

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Sembilan Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Tengah Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (*unaudited*) kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Kamis 28 Maret 2024, sembilan Pemerintah Daerah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 (*unaudited*) kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Sembilan Pemerintah Daerah tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. LKPD tersebut langsung diserahkan oleh Kepala Daerah atau yang mewakili dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA., CFA.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK bertujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kesimpulan atas opini didasarkan pada empat kriteria yaitu 1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pencapaian opini atas Laporan Keuangan membutuhkan kerja keras yang konsisten oleh segenap jajaran pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Pencapaian opini WTP mencerminkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah sudah baik dan BPK berharap bahwa pencapaian tersebut juga diimbangi dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut yang makin meningkat, SPI yang semakin baik dan lengkap yang diimbangi dengan komitmen pimpinan daerah yang tinggi. Hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2023 pada sembilan Pemerintah Daerah dengan status sesuai rekomendasi yaitu sebagai berikut.

No	Pemda	TL Sesuai
1	Provinsi Kalimantan Tengah	72,87%
2	Pemerintah Kota Palangka Raya	88,91%
3	Pemerintah Kabupaten Lamandau	83,83%
4	Pemerintah Kabupaten Katingan	83,13%
5	Pemerintah Kabupaten Kapuas	79,38%
6	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	84,13%
7	Pemerintah Kabupaten Seruyan	80,64%
8	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	85,86%
9	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	82,05%

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Sedangkan hasil pengukuran efektivitas SPI pada entitas yang diserahkan pada hari ini diketahui bahwa nilai rata-rata SPI untuk semua Pemda adalah belum sepenuhnya efektif.

Pada Semester II Tahun 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Pemprov Kalteng, Pemkab Lamandau, Pemkab Gunung Mas, dan Pemkab Katingan. Penyelesaian rekomendasi atas permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut akan menjadi pertimbangan materialitas khususnya dalam penentuan opini pada saat pemeriksaan terinci LKPD nanti. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan interim LKPD Tahun 2023 pada 15 entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah dalam pemeriksaan terinci diantaranya sebagai berikut.

1. Sistem Pengendalian pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD dilakukan secara tidak tertib dimana terdapat permasalahan kas tekor di Bendahara, pengelolaan Kas Tunai di Bendahara, serta pengelolaan kas tunai panjar tidak sesuai dengan ketentuan;
2. SPJ di Bendahara Pengeluaran, di Bendahara BOS dan BOK belum sepenuhnya lengkap;
3. Implementasi Perpres 33 Tahun 2020 masih belum sepenuhnya dilaksanakan;
4. Kekurangan volume, kelebihan pembayaran dan pengenaan denda keterlambatan pada SPJ Belanja Modal; dan
5. Aset Tetap belum dikapitalisasi sesuai dengan aset induknya.

Selain itu, sejalan dengan renstra BPK 2020-2024, dimana visi BPK adalah Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, BPK berharap bahwa pencapaian opini WTP oleh pemerintah daerah berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing yang tergambarkan melalui pencapaian – pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat yaitu antara lain semakin menurunnya angka Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan, serta semakin meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dari umur yang panjang dan hidup yang sehat, terpenuhinya pengetahuan/pendidikan, serta standar hidup yang layak sehingga dapat meningkatkan daya beli.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id